



LAPORAN KINERJA TAHUNAN

Laporan Kinerja Tahun 2019

**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Jl. Ahmad Yani Tlp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062 Kode Pos 78124
PONTIANAK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas izin-Nya penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 dapat selesai disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada :

- ❖ Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ❖ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP;

Laporan Kinerja Tahunan merupakan media akuntabilitas manajerial Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Gubernur mengenai capaian kinerja suatu instansi atas dasar rencana kinerja yang secara berkala setiap tahun disusun laporannya. Kami berharap Laporan Kinerja yang kami susun dapat menyajikan informasi yang diperlukan atas kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Semoga Laporan Kinerja Tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 31 Maret 2020
KEPALA BIRO ORGANISASI,



MARJANI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19660302 198703 1 012

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
4. Sumber Daya Aparatur	7
5. Sumber Daya Keuangan	9
6. Sarana dan Prasarana	10
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
A. Perencanaan Strategis	27
1. Visi	27
2. Misi	27
3. Tujuan dan SasaranStrategis	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP.....	57
LAMPIRAN :	
1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019.	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.	
3. Struktur Organisasi SKPD.	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM.

1. *Pendahuluan*

Biro Organisasi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Biro Organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tugas Biro Organisasi adalah merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah.

Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar terdiri atas 3 Bagian dan 9 Sub Bagian :

1. Bagian Kelembagaan, membawahi :
 - Sub Bagian Kelembagaan Provinsi ;
 - Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis ;
 - Sub Bagian Tata Usaha Biro.
2. Bagian Ketatalaksanaan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Prosedur;
 - Sub Bagian Pelayanan Publik;
 - Sub Bagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja.
3. Bagian Analisis Jabatan dan kepegawaian, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - Sub Bagian Analisis Jabatan;
 - Sub Bagian Formasi dan Reformasi Birokrasi;
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Setda
4. Kelompok Jabatan Fungsional

2. *Susunan Organisasi.*

Susunan Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

1. *Kepala Biro.*

2. *Bagian Kelembagaan.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

Bagian Kelembagaan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

1). *Sub Bagian Kelembagaan Provinsi.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

2). *Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

3). *Sub Bagian Tata Usaha Biro.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

3. Bagian Ketatalaksanaan.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Ketatalaksanaan (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

Bagian Ketatalaksanaan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

1). *Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Prosedur.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan.

2). *Sub Bagian Pelayanan Publik.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan.

3). *Sub Bagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan.

4. Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

1). *Sub Bagian Analisis Jabatan.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian.

2). *Sub Bagian Formasi dan Reformasi Birokrasi.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian.

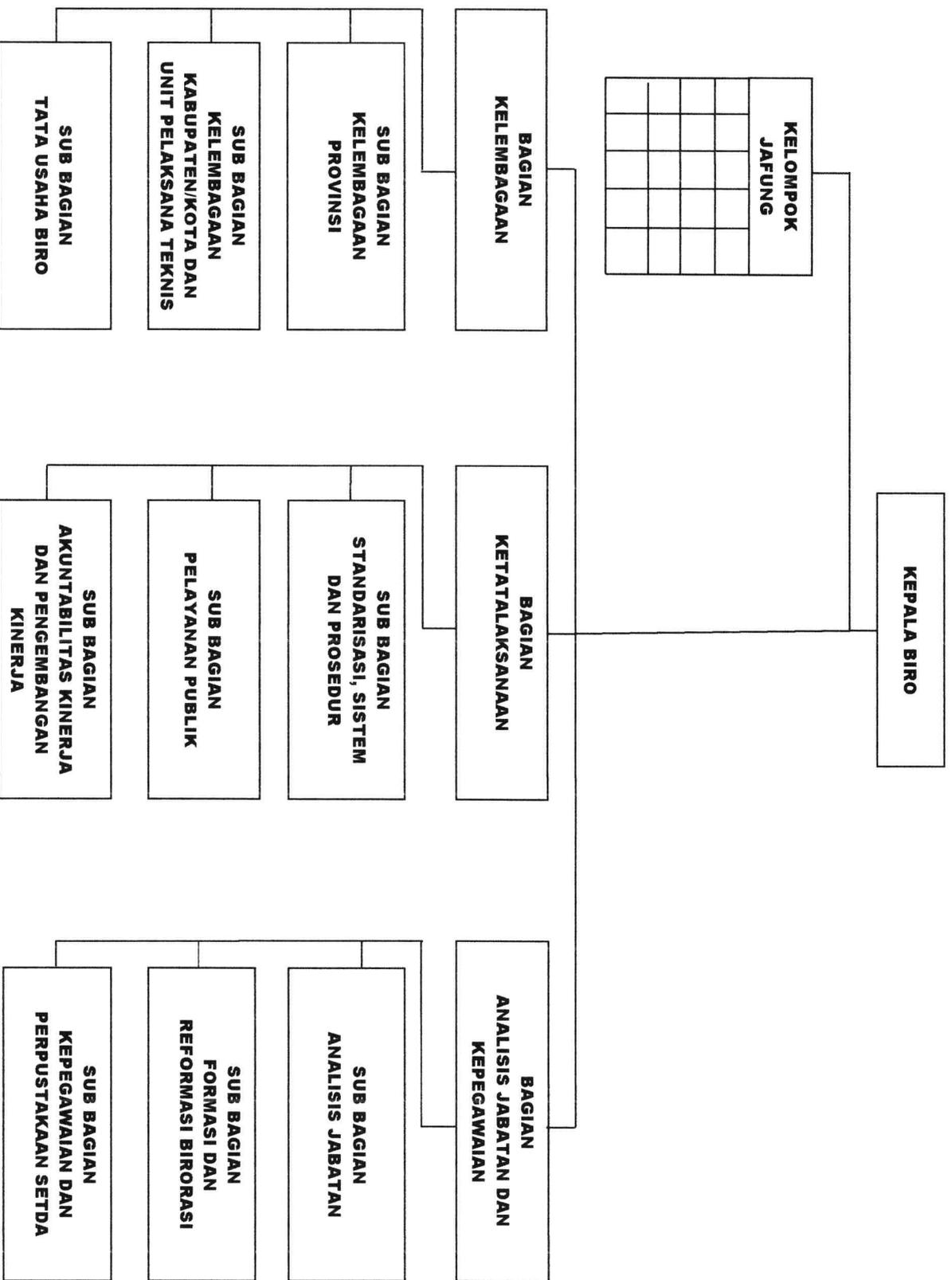
3). *Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian.

5. *Kelompok Jabatan Fungsional*

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

(Susunan Organisasi dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini).



3. Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tugas Biro Organisasi adalah merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) perumusan program kerja di bidang organisasi;
- b) perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang organisasi pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) pelaksanaan tugas lainnya di bidang organisasi yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan saat ini didukung oleh 33 orang pegawai.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin jumlah Pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar sebagaimana terlihat pada **Tabel 1.1.** sebagai berikut :

Tabel 1.1.

**JUMLAH PEGAWAI BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI KALBAR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Pasca Sarjana	1	9	10
2.	Sarjana/D IV	8	9	17
3.	Diploma III	1	2	3
4.	SLTA	1	4	5
J U M L A H		11	24	35

Sumber : Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2019

Bila dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat terlihat pada **Tabel 1.2.** sebagai berikut:

Tabel 1.2.

**JUMLAH PEGAWAI BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI KALBAR BERDASARKAN
PANGKAT/GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019**

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Pembina Tingkat I / IV b	1	1	2
2.	Pembina / IV a	0	4	4
3.	Penata Tingkat I / III d	3	4	7
4.	Penata / III c	2	2	4
5.	Penata Muda Tingkat I / III b	3	8	11
6.	Penata Muda / III a	1	5	6
7.	Pengatur Tk.I	0	1	1
J U M L A H		10	25	35

Sumber : Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dari jumlah 35 orang pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, yang menduduki sebagai **Jabatan Struktural sebanyak 13 pegawai** terbagi atas : untuk eselon II.b sebanyak 1 orang, eselon III.a sebanyak 3 orang dan eselon IV.a sebanyak 9 orang. Saat ini untuk formasi jabatan struktural telah terisi semua. Untuk lebih jelasnya susunan Pejabat Struktural dilingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat tersebut dapat dilihat pada **Tabel 1.3** di bawah ini.

Tabel 1.3.
PEGAWAI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL TAHUN 2019

NO	JABATAN / NAMA	PENDI DIKAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
A	ESELON II.a			
1	Marjani, SE, M.Si	S-2	IV/b	Kepala Biro
B	ESELON III.a			
1	Chasmiati, S.IP, M.Si	S-2	IV/b	Kabag Kelembagaan
2	Nelly Saleha Meilani,S.STP, M.Si	S-2	IV/b	Kabag Ketatalaksanaan
3	Dewi Ginasari, S.STP, M.Si	S-2	IV/a	Kabag Analisis Jabatan dan Kepegawaian
C	ESELON IV.a			
1	Wida Febriana, S.Sos, M.Si	S-2	III/d	Kasubbag Kelembagaan Provinsi
2	Rani Maya Sari, S.STP, M.Si	S-2	III/d	Kasubbag Kelembagaan Kab/Kota dan UPT
3	Shinta Ikasari,S.STP	D-IV	III/d	Kasubbag Tata Usaha Biro
4	Siti Aisyah, S.Sos	S-1	III/c	Kasubbag Standarisasi, Sistem dan Prosedur
5	Glen Septian ADS, S.STP	S-1	III/d	Kasubbag Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja
6	Rudy Syarifuddin, S.STP	D-IV	III/d	Kasubbag Pelayanan Publik
7	Marselinus Pranata,S.STP	S-1	III/d	Kasubbag Analisis Jabatan
8	Sri Umiyati,S.STP, M.Si	S-2	IV/a	Kasubbag Formasi dan Reformasi Birokrasi
9	Eva Roslinda,SE, MM	S-2	III/c	Kasubbag Kepegawaian Setda

Sumber : Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun

2019

Tabel 1.4.
PEGAWAI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
TAHUN 2019

NO	NAMA	PENDI DIKAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Florina Wiyunny, SE	S-1	III/a	Arsiparis Pertama
2	Jalu Aji Bhaskoro	D-3	II/d	Pranata Komputer Pelaksana

Sumber : Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2019

Untuk posisi Jabatan Fungsional tertentu 2 orang PNS, dan untuk Jabatan Fungsional Umum sebanyak 19 orang PNS.

5. Sumber Daya Keuangan.

Salah satu sarana penunjang yang cukup penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana atau besarnya anggaran, tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya di Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar.

Pada Tahun Anggaran 2019, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi anggaran adalah sebesar **Rp. 3.337.059.950,-** yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019. Pada saat perubahan anggaran pada pertengahan tahun 2019, pagu anggaran Biro Organisasi berubah menjadi **Rp. 3.092.546.200,-** yang ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019. Rincian belanja untuk anggaran tersebut tercermin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) dengan rekapitulasi terlihat pada **Tabel 1.4.** sebagai berikut :

Tabel 1.5
REKAPITULASI APBD PER JENIS BELANJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai :			
	-Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0
	-Tambahan	0,00	0,00	0

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Penghasilan PNS			
	JUMLAH BTL	0,00	0,00	0
2.	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	1.331.300.000,00	1.273.580.000,00	95,66
	Belanja Barang dan Jasa	1.761.246.200,00	1.521.957.850,00	88,14
	JUMLAH BL	3.092.546.200,00	2.822.434.850,00	91,27
	JUMLAH SELURUHNYA	3.092.546.200,00	2.822.434.850,00	91,27

Sumber : Data Keuangan Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2019

Dari jumlah anggaran tersebut di atas, dialokasikan untuk alokasi Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.331.300.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.761.246.200,00.

6. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang digunakan dan dimiliki Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat saat ini menempati salah Gedung di Komplek Kantor Gubernur Kalbar pada Lantai 2 yang terletak di Jl. A. Yani Pontianak.

a. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang ada pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, dapat dilihat pada **Tabel 1.6**, di bawah ini :

Tabel 1.6
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
TAHUN 2019

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	Avanza	2006	180,000,000.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	Suzuki Vitara	2010	291,750,000.00	APBD
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	New Avanza	2012	171,000,000.00	APBD
4	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2006	13,200,000.00	APBD
5	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR	2008	14,380,000.00	APBD
6	Sepeda Motor	Honda 125	2011	16,242,400.00	APBD
7	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	16,288,575.00	APBD
8	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	16,288,575.00	APBD
9	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	16,288,575.00	APBD
10	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	16,288,575.00	APBD
11	Cermin Besar (200x75 cm)	Yamaha Jupiter MX	2005	800,000.00	APBD
12	Mesin Ketik Manual Standar (14 - 16)	Olivetti	2004	931,000.00	APBD
13	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	2006	931,000.00	APBD
14	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	2008	1,080,000.00	APBD
15	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	2012	3,768,475.00	APBD
16	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	2012	3,768,475.00	APBD
17	Mesin Cetak Stereo Pioner (Braile)	Persona	2009	45,837,000.00	APBD
18	Mesin Absen (Time Recorder)	REKABIO	2014	50,527,500.00	APBD
19	Lemari Besi/Metal	Brother	2012	2,361,575.00	APBD
20	Lemari Besi/Metal	Brother	2012	2,361,575.00	APBD
21	Lemari Besi/Metal	Brother	2012	2,361,575.00	APBD
22	Lemari Besi/Metal	Presiden	2002	1,060,000.00	APBD
23	Lemari Besi/Metal	Sibas	2006	1,650,000.00	APBD
24	Lemari Besi/Metal	Atlantic	2002	1,650,000.00	APBD
25	Lemari Besi/Metal	Atlantic	2002	1,650,000.00	APBD
26	Lemari Besi/Metal	Alba	2006	2,300,000.00	APBD
27	Lemari Besi/Metal	Atlantic	2002	1,650,000.00	APBD
28	Lemari Besi/Metal	Sibas	2008	2,697,750.00	APBD
29	Lemari Besi/Metal	Sibas	2008	2,697,750.00	APBD
30	Lemari Besi/Metal	Sibas	2008	2,6697,750.00	APBD
31	Lemari Besi/Metal	Brother	2018	2.985.735.00	APBD
32	Filling Besi/Metal	Brother	2012	1,607,885.00	APBD
33	Filling Besi/Metal	Alba	2000	2,000,000.00	APBD
34	Filling Besi/Metal	Alba	2006	2,000,000.00	APBD
35	Filling Besi/Metal	Delta	2006	2,100,000.00	APBD
36	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
37	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD
38	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD
39	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD
40	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD
41	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD
42	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	2,702,500.00	APBD
43	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	2,702,500.00	APBD
44	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	2,702,500.00	APBD
45	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	2,702,500.00	APBD
46	Filling Besi/Metal	Brother	2018	2.681.130,00	APBD
47	Filling Besi/Metal	Brother	2018	1.716.805,00	APBD
48	Band Kas/ Brankas	Cosmos	2005	2,850,000.00	APBD
49	Alat Penghancur Kertas	KAZURE SHREDDER	2016	2,671,993.00	APBD
50	Overhead Projektor	Acer	2009	8,000,000.00	APBD
51	Overhead Projektor	Acer	2013	4,612,773.00	APBD
52	Kotak Katalog/ Brosur	Alba	2006	676,000.00	APBD
53	Meja kayu/Rotan	Marco	2000	500,000.00	APBD
54	Meja kayu/Rotan	Marco	2000	500,000.00	APBD
55	Meja kayu/Rotan	Marco	2000	500,000.00	APBD
56	Meja kayu/Rotan	Briliant	2006	300,000.00	APBD
57	Meja Rapat	Briliant	2013	2,105,831.00	APBD
58	Meja Tulis	Marco	2006	100,000.00	APBD
59	Meja Resepsionis	Briliant	2006	500,000.00	APBD
60	Kursi Rapat	Compoporpro	2013	651,805.00	APBD
61	Kursi Rapat	Compoporpro	2013	651,805.00	APBD
62	Kursi Rapat	Compoporpro	2013	651,805.00	APBD
63	Kursi Rapat	Compoporpro	2013	651,805.00	APBD
64	Kursi Rapat	Fantoni	2010	610,000.00	APBD
65	Kursi Rapat	Fantoni	2010	610,000.00	APBD
66	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
67	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
68	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
69	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
70	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
71	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
72	Kursi Rapat	fantoni	2008	457,500.00	APBD
73	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
74	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
75	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
76	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
77	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
78	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
79	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
80	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
81	Kursi tamu	Jati	2008	8,500,000.00	APBD
82	Kursi tamu	Fantoni	2013	10,562,500.00	APBD
83	Kursi tamu	Fantoni	2014	17,344,944.00	APBD
84	Kursi Putar	ASIMA	2008	405,000.00	APBD
85	Kursi Putar	ASIMA	2008	405,000.00	APBD
86	Kursi Putar	ASIMA	2008	405,000.00	APBD
87	Kursi Putar	ASIMA	2008	405,000.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
88	Kursi Putar	ASIMA	2008	405,000.00	APBD
89	Kursi Putar	UCHIWA	2006	1,988,000.00	APBD
90	Kursi Putar	UCHIWA	2006	1,988,000.00	APBD
91	Kursi Putar	UCHIWA	2006	1,988,000.00	APBD
92	Kursi Putar	UCHIWA	2006	1,988,000.00	APBD
93	Kursi Putar	Fantoni	2010	962,500.00	APBD
94	Kursi Putar	Fantoni	2010	962,500.00	APBD
95	Kursi Putar	Fantoni	2010	962,500.00	APBD
96	Kursi Putar	Fantoni	2010	962,500.00	APBD
97	Kursi Putar	Fantoni	2010	528,000.00	APBD
98	Kursi Putar	Fantoni	2010	528,000.00	APBD
99	Kursi Putar	Fantoni	2010	528,000.00	APBD
100	Kursi Putar	Fantoni	2010	528,000.00	APBD
101	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
102	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
103	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
104	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
105	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
106	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
107	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
108	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
109	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
110	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
111	Meja Komputer	Briliant	2006	480,250.00	APBD
112	Meja Komputer	Briliant	2006	480,250.00	APBD
113	Meja Komputer	Briliant	2006	480,250.00	APBD
114	Tikar		2013	23,866,080.00	APBD
115	Tikar		2012	53,451,900.00	APBD
116	Sofa	Fantoni	2006	8,000,000.00	APBD
117	Mesin Penghisap Debu	Sharp	2010	1,538,050.00	APBD
118	Lemari Es	Sanyo	2009	2,453,000.00	APBD
119	AC Unit	GREE	2016	8,525,647.00	APBD
120	AC Unit	GREE	2016	8,525,647.00	APBD
121	AC Unit	LG	2013	5,160,270.00	APBD
122	AC Unit	LG	2013	3,754,460.00	APBD
123	AC Unit	LG	2013	3,754,460.00	APBD
124	AC Unit	LG	2013	6,644,160.00	APBD
125	AC Unit	LG	2013	6,644,160.00	APBD
126	AC Unit	LG	2013	3,754,460.00	APBD
127	AC Unit	Panasonic	2006	13,000,000.00	APBD
128	AC Unit	AUX	2018	7.475.221,00	APBD
129	Televisi	Sanyo	2010	1,743,150.00	APBD
130	Televisi	LG	2006	21,700,000.00	APBD
131	Televisi	Shap	2009	11,599,500.00	APBD
132	Amplifier	ADC	2006	2,100,000.00	APBD
133	Sound System	BMC	2006	4,800,000.00	APBD
134	Sound System	BMC	2006	4,800,000.00	APBD
135	Laser Disc	DATS	2006	1,350,000.00	APBD
136	Wireless	WM 2800	2006	700,000.00	APBD
137	Wireless	JMK	2013	6,417,771.00	APBD
138	Unit Power Supply (UPS)	Power Pro	2013	915,714.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
139	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2012	902,005.00	APBD
140	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2012	902,005.00	APBD
141	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2012	592,905.00	APBD
142	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2012	592,905.00	APBD
143	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2012	592,905.00	APBD
144	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2012	592,905.00	APBD
145	Unit Power Supply (UPS)	ICA CP1400	2011	1,462,820.00	APBD
146	Unit Power Supply (UPS)	ICA CP1400	2011	1,462,820.00	APBD
147	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2008	1,500,000.00	APBD
148	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2008	1,500,000.00	APBD
149	Unit Power Supply (UPS)	Canon	2006	5,700,000.00	APBD
150	Unit Power Supply (UPS)	Canon	2006	5,700,000.00	APBD
151	Unit Power Supply (UPS)	Canon	2006	5,700,000.00	APBD
152	Unit Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700	2014	1,006,000.00	APBD
153	Unit Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700	2014	1,006,000.00	APBD
154	Unit Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700	2014	1,006,000.00	APBD
155	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2010	1,489,677.00	APBD
156	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
157	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
158	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
159	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
160	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
161	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
162	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
163	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
164	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2018	1.408.074,00	APBD
165	Tangga Alumunium	Alumanium	2013	745,071.00	APBD
166	P.C. Unit	LG	2008	16,266,667.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
167	P.C. Unit	LG	2008	16,266,667.00	APBD
168	P.C. Unit	LG	2008	16,266,667.00	APBD
169	P.C. Unit	LG	2010	5,639,500.00	APBD
170	P.C. Unit	LG	2010	5,639,500.00	APBD
171	P.C. Unit	Simbada	2012	6,974,180.00	APBD
172	P.C. Unit	Simbada	2012	6,974,180.00	APBD
173	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
174	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
175	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
176	P.C. Unit	New Power Pro	2013	7,080,000.00	APBD
177	P.C. Unit	Dell	2013	9,000,924.00	APBD
178	P.C. Unit	Dell	2013	9,000,924.00	APBD
179	P.C. Unit	LG	2015	7,850,380.00	APBD
180	P.C. Unit	Intel Xeon	2014	45,446,000.00	APBD
181	P.C. Unit	AIO LENOVO C4030	2015	15,838,973.00	APBD
182	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
183	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
184	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
185	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
186	P.C. Unit	Simbada	2012	6,974,180.00	APBD
187	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
188	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
189	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
190	P.C. Unit	New Power Pro	2013	7,080,000.00	APBD
191	P.C. Unit	Dell	2013	9,000,924.00	APBD
192	P.C. Unit	Dell	2013	9,000,924.00	APBD
193	P.C. Unit	LG	2015	7,850,380.00	APBD
194	P.C. Unit	Intel Xeon	2014	45,446,000.00	APBD
195	P.C. Unit	AIO LENOVO C4030	2015	15,838,973.00	APBD
196	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
197	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
198	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
199	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
200	P.C. Unit	HP/All-In-One	2018	8.020.996,00	APBD
201	Note Book	Acer	2008	12,000,600.00	APBD
202	Note Book	Acer	2009	12,750,000.00	APBD
203	Note Book	Acer	2008	12,980,000.00	APBD
204	Note Book	Acer	2008	13,750,000.00	APBD
205	Note Book	Acer	2008	13,750,000.00	APBD
206	Note Book	Acer	2010	8,818,150.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
207	Note Book	Acer	2010	8,818,150.00	APBD
208	Note Book	Acer	2011	9,432,700.00	APBD
209	Note Book	Toshiba	2012	8,029,353.00	APBD
210	Note Book	Toshiba	2012	8,029,353.00	APBD
211	Note Book	Toshiba	2012	8,029,353.00	APBD
212	Note Book	Toshiba	2012	8,029,353.00	APBD
213	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
214	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
215	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
216	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
217	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
218	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
219	Note Book	Touch Screean	2014	10,100,200.00	APBD
220	Note Book	Acer	2016	11,609,918.00	APBD
221	Note Book	Acer	2016	11,609,918.00	APBD
222	Laptop/Note Book	Lenovo ideapad	2018	8.020.996,00	APBD
223	Laptop/Note Book	Lenovo ideapad	2018	8.020.996,00	APBD
224	Laptop/Note Book	Lenovo ideapad	2018	8.020.996,00	APBD
225	Monitor	Dell	2012	1,959,605.00	APBD
226	Monitor	Dell	2012	1,959,605.00	APBD
227	Monitor	Dell	2012	1,959,605.00	APBD
228	Monitor	LG Flatron ez T 530S	2007	4,072,000.00	APBD
229	Monitor	LG Flatron ez T 530S	2007	4,072,000.00	APBD
230	Printer	Pixma	2010	922,850.00	APBD
231	Printer	Pixma	2010	922,850.00	APBD
232	Printer	Canon Pixma	2012	964,548.00	APBD
233	Printer	Canon Pixma	2012	964,548.00	APBD
234	Printer	Canon Pixma	2012	964,548.00	APBD
235	Printer	Canon Injeksi	2013	2,228,170.00	APBD
238	Printer	Epson	2012	8,067,639.00	APBD
239	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
240	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
241	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
242	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
243	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
244	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
245	Printer	Canon	2012	949,655.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Pixma			
246	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
247	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
248	Printer	Epson	2013	8,178,000.00	APBD
249	Printer	Epson	2013	8,178,000.00	APBD
250	Printer	Canon	2015	4,312,181.00	APBD
251	Printer	HP	2015	1,658,531.00	APBD
252	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
253	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
254	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
255	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
256	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
257	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
258	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
259	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
260	Printer	Epson L 360	2018	2.433.957,00	APBD
261	Printer	Epson L 360	2018	2.433.957,00	APBD
262	Printer	Epson L 360	2018	2.433.957,00	APBD
263	Printer	Epson L 360	2018	2.433.957,00	APBD
264	Printer	Epson L 560	2018	5.200.000,00	APBD
265	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Briliant	2006	445,000.00	APBD
266	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Marco	2000	650,000.00	APBD
267	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Marco	2000	650,000.00	APBD
268	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Marco	2002	650,000.00	APBD
269	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Marco	2002	650,000.00	APBD
270	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	675,000.00	APBD
271	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
272	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
273	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
274	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
275	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
276	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
277	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
278	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Marco	2000	850,000.00	APBD
279	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Marco	2000	850,000.00	APBD
280	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
281	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
282	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
283	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
284	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
285	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
286	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
287	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
288	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,189,500.00	APBD
289	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
290	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
291	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
292	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD
293	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD
294	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD
295	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2001	445,000.00	APBD
296	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Monaco	2006	445,000.00	APBD
297	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Monaco	2001	445,000.00	APBD
298	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD
299	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD
300	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
301	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
302	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
303	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
304	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
305	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
306	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
307	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
308	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
309	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
310	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
311	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
312	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
313	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
314	Kursi Rapat Ruangan Rapat	Ponti	2000	445,000.00	APBD
315	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
316	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
317	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
318	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
319	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
320	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
321	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
322	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Adi Tech	2003	4,000,000.00	APBD
323	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Alba	2006	1,112,000.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
324	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Alba	2008	1,112,000.00	APBD
325	Microphone/Wireless Mic	BATT	2006	900,000.00	APBD
326	Microphone/Wireless Mic	BATT	2006	900,000.00	APBD
327	Camera Electronic	Canon	2013	8,608,838.00	APBD
328	Exhaust Fan	Sanyo	2011	1,800,000.00	APBD
329	Exhaust Fan	Sanyo	2011	1,800,000.00	APBD
330	Meja Kerja	Haigh Paint	2010	3,049,200.00	APBD
331	Meja Kerja	Import	2009	695,000.00	APBD
332	Meja Kerja	Import	2009	6,949,800.00	APBD
333	Meja Kerja	Haigh Paint	2010	3,049,200.00	APBD
334	Meja Kerja	Import	2009	695,000.00	APBD
335	Meja Kerja	Monaco	2008	2,467,500.00	APBD
336	Meja Kerja	Monaco	2008	2,467,500.00	APBD
337	Meja Kerja	Monaco	2008	2,467,500.00	APBD
338	Meja Kerja	Haigh Paint	2010	1,622,500.00	APBD
339	Meja Kerja	Haigh Paint	2010	1,622,500.00	APBD
340	Meja Kerja	Monaco	2007	1,650,000.00	APBD
341	Meja Kerja	Monaco	2007	1,650,000.00	APBD
342	Meja Kerja	Monaco	2007	1,650,000.00	APBD
343	Meja Kerja	Monaco	2008	2,450,000.00	APBD
344	Meja Kerja	Monaco	2008	2,450,000.00	APBD
345	Meja Kerja	Monaco	2008	2,450,000.00	APBD
346	Meja Kerja	Monaco	2008	1,637,300.00	APBD
347	Meja Kerja	Monaco	2008	1,637,300.00	APBD
348	Meja Kerja	Monaco	2008	1,637,300.00	APBD
349	Meja Kerja	Monaco	2008	1,637,300.00	APBD
350	Meja Kerja	Monaco	2008	1,637,300.00	APBD
351	Meja Kerja	Monaco	2008	1,646,000.00	APBD
352	Meja Kerja	Monaco	2008	1,646,000.00	APBD
353	Meja Kerja	Monaco	2008	1,646,000.00	APBD
354	Meja Kerja	Monaco	2008	1,646,000.00	APBD
355	Meja Kerja	Monaco	2008	1,646,000.00	APBD
356	Meja Kerja	Marco	2002	650,000.00	APBD
357	Meja Kerja	Marco	2002	650,000.00	APBD
358	Meja Kerja	Marco	2002	650,000.00	APBD
359	Meja Kerja	Marco	2002	650,000.00	APBD
360	Meja Kerja	Marco	2001	601,000.00	APBD
361	Meja Kerja	Marco	2001	601,000.00	APBD
362	Meja Kerja	Marco	2001	601,000.00	APBD
363	Meja Kerja	Briliant	2006	330,000.00	APBD
364	Meja Kerja	Monaco	2008	2,467,500.00	APBD
365	Layar	GALAXI	2013	892,472.00	APBD
366	Layar	GALAXI	2013	892,472.00	APBD
	JUMLAH			1.808.245.421,00	

Sumber : Data Aset Biro Organisasi Setda Prov. kalbar Tahun 2019

B. PEMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).

Secara umum yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah adalah :

1. Penataan organisasi perangkat daerah belum efisien, efektif dan proporsional yang berdasarkan kewenangan karakteristik dan potensi daerah.
2. Masih belum optimalnya penyelenggaraan ketatalaksanaan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.
3. Masih belum optimalnya pelayanan publik serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang disebabkan kapasitas SDM belum merata, fasilitas yang terbatas serta prosedur yang belum baku
4. Perubahan dan perkembangan kebijakan aparatur.
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Perlunya peningkatan kemampuan Pegawai dalam melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja suatu organisasi pada setiap akhir tahun anggaran oleh pimpinan dan *stakeholders* lainnya dengan menggunakan tiga tolok ukur, yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program-program pembangunan.

1. VISI

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki Visi dan Misi khusus, namun Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus dapat mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Adapun Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**.

2. MISI

Sesuai dengan visi, maka ditetapkan misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2018 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- a. **Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
- b. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu, dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi Bagian Selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.

- c. **Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Peningkatan Pendidikan dan Derajat Kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
- e. **Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis antar kelompok etnis, agama, dan wilayah.
- f. **Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun).

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar adalah :

TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	
1		2	
1.	Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan berbasis kinerja.	1	Meningkatnya Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	
1		2	
2.	Terwujudnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	2	Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik
3.	terwujudnya Sistem Manajemen SDM Aparatur.	3	Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4.	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	4	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar.

B. PERJANJIAN KINERJA (PERJANKIN) TAHUN 2019

Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran.	46%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	IKM Provinsi Kalbar	83
3.	Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur	20%
4.	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	10,5

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp. 449.090.300,00	APBD
2. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Rp. 577.403.200,00	APBD
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Rp. 844.730.600,00	APBD
4. Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 385.458.600,00	APBD
Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis	Rp. 2.256.682.700,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2018-2023, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran target kinerja sebanyak 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Biro Organisasi Setda. Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1) Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran.	46%	73%	158
2.	Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	2) IKM Provinsi Kalbar	83	83,17	100,1
3.	Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	3) Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur	20%	20%	100
4.	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.	4) Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	10,5	10,52	100,1

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1) Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran.	46%	73%	158

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran”**, mencapai **158%** atau dapat dikategorikan **“Sangat Berhasil”**. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

Target Penataan Kelembagaan perangkat daerah Tahun 2019 sebanyak 2 perangkat daerah (46%) dan penataan kelembagaan perangkat daerah terealisasi sebanyak 12 perangkat daerah, sehingga untuk realisasi penataan kelembagaan perangkat daerah tahun 2018 dan 2019 sebanyak 27 perangkat daerah (73%).

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	449.090.300	411.850.500	91,71	158	66,29

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,71% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 158%, maka pada sasaran ini terdapat Cost Cutting Program efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 66,29 %.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran ditunjang oleh program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah, yang meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/ Kota.
Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan penugasan pejabat struktural/staf ke seluruh Kabupaten/Kota daerah dalam rangka menggali informasi guna penyusunan dan perumusan kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi Se Kalbar.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kota Singkawang pada tanggal 24 s.d 26 April 2019. Adapun hasil dari kegiatan ini Laporan tentang pelaksanaan kegiatan berupa :
 - a. Terinventarisirnya berbagai permasalahan dibidang organisasi.
 - b. Tersusunnya rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap berbagai
 - c. permasalahan dibidang organisasi.
 - d. Terciptanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penataan organisasi.
3. Kegiatan Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Provinsi Kalbar.
Hasil kegiatan yang dilakukan adalah Persentase Dinas dan Badan yang dilakukan pembentukan dan pembubaran tugas pokok dan fungsi UPT dengan Baik dengan target 100% dan capaian indikator tersebut sebesar 100% yaitu Pencabutan 16 UPT dan penghapusan 10 UPPT pada Dinas dan Badan yang dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian penataan kelembagaan UPT sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

4. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kegiatan menghasilkan terintegrasinya data kelembagaan perangkat daerah provinsi dan Kab/Kota ke dalam satu system melalui web. www.kalbar.go.id.
5. Kegiatan Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini telah dihasilkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar.
 - Ditetapkannya beberapa Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 yaitu :
 - 1) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
 - 2) Inspektorat Provinsi kalbar
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar
 - 7) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar
 - 8) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar
 - 9) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar
 - 10) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalbar
 - 11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar
 - 12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar
 - Melakukan Penyusunan Pergub Tupoksi yang dimasukkan fungsi Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Pelayanan Publik sebanyak 24 Pergub Tupoksi Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar
 - 3) Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
 - 4) Dinas Sosial Provinsi Kalbar
 - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar
 - 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar
 - 7) Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar

- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar
 - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar
 - 10) Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar
 - 11) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar
 - 12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalbar
 - 13) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar
 - 14) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar
 - 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar
 - 16) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar
 - 17) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar
 - 18) Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar
 - 19) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar
 - 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar
 - 21) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalbar
 - 22) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalbar
 - 23) Badan Penghubung Provinsi Kalbar
 - 24) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar
7. Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas.
- Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan pembentukan cabang dinas pada dinas pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
- a) Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan barat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan memfasilitasi Dinas dan Badan yang akan melakukan pembentukan cabang dinas, antara lain :
 - Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja cabang dinas wilayah I pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan barat. Meliputi : Kota Singkawang, Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang (berkedudukan di Kota Singkawang).
 - Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja cabang dinas wilayah II pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan barat. Meliputi : Kab.

Landak, Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau (berkedudukan di Kab. Sanggau).

- Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja cabang dinas wilayah III pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan barat. Meliputi : Kab. Melawi, Kab. Sintang dan Kab. Kapuas Hulu (berkedudukan di Kab. Sintang),
- Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja cabang dinas wilayah IV pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan barat. Meliputi : Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara (berkedudukan di Kab. Ketapang),
- Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja cabang dinas wilayah V pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan barat. Meliputi : Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak (berkedudukan di Kota. Pontianak)

b. Terciptanya Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan dalam memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata bagi PNS pada SMA/SMK se-Kalimantan Barat.

8. Kegiatan Tingkat Nasional di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah.

Adapun capaian kinerja dari kegiatan Koordinasi Tingkat Nasional di Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2019 yaitu Persentase jumlah laporan koordinasi tingkat nasional bidang kelembagaan perangkat daerah dan tingkat kehadiran mengikuti rapat koordinasi tingkat nasional bidang kelembagaan sebesar 100%.

Terciptanya persamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menindaklanjuti permasalahan-permasalahan di bidang organisasi. Selanjutnya adanya arahan dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi yang berkaitan dengan bidang organisasi antara pusat dan daerah.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 – 2019 dan target RPJMD

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan target RPJMD Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
1.	Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran.		41%	73%	46%	

Pada bulan Desember tahun 2015 dilakukan penataan perangkat daerah secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 sehingga pada tahun 2017 belum dilakukan penataan perangkat daerah dikarenakan baru dilakukan pelantikan pejabat structural perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Januari 2017.

Pada Tahun 2018 Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran ditargetkan sebanyak 41% dan terealisasi sebanyak 41% dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Sementara pada tahun 2019 Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran terealisasi sebanyak 46% dengan capaian kinerja sebesar 158 %.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran melebihi target yang ditetapkan tahun 2019, hal ini disebabkan oleh adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kelembagaan perangkat daerah.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran ini, yaitu :

Masih belum ditetapkannya beberapa Peraturan Perundang-Undangan di bidang organisasi sebagai pedoman dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah secara optimal.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendala tersebut, antara lain :
Melakukan koordinasi dengan Kementerian yang terkait dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	IKM Provinsi Kalbar	83	83,17	100,1
Capaian Kinerja Sasaran 2					100,1

Realisasi capaian kinerja IKM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ditargetkan sebanyak 83 dan terealisasi sebanyak 83,22 dengan capaian kinerja sebesar 100,2 %. IKM Provinsi Kalimantan Barat 2019 sebanyak 83,17 sedangkan IKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2019 ialah 83,47.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2.	Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	577.403.200	530.311.200	91,84	100,1	8,26

Realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar 91,84%, realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,1%, maka pada sasaran ini terdapat Cost Cutting Program efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,26 %.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik ditunjang oleh program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah. Upaya-upaya untuk mencapai sasaran 2 tersebut di atas, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang meliputi kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota

Dari hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada bidang Ketatalaksanaan dapat disampaikan data-data sebagai berikut :

1. Monitoring dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab kepada Bagian Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota se Kalimantan Barat. Yang dikunjungi, dan pada tahun 2019 sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota yang telah di kunjungi yaitu Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau dan terakhir yaitu Kabupaten Landak.

2. Data mengenai implementasi peraturan bidang ketatalaksanaan yang akan diinventarisir meliputi :

a. Tata Naskah Dinas ;

b. Pakaian Dinas;

c. Standar Operasional Prosedur (SOP);

2. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal.

Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut :

1. Nilai capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalbar tahun 2018 adalah 62,47 %. Hal ini merupakan nilai rata-rata dari penerapan SPM Pemprov yaitu 71,32 % dan nilai penerapan SPM Kabupaten/Kota yaitu 55,61 %, (hasil rekapitulasi terlampir);

2. Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik rapat teknis 6 bidang SPM maupun rapat teknis dengan menghasilkan masukan-masukan, saran dan pertanyaan terkait penyusunan laporan SPM Provinsi Kalbar Tahun 2018.

3. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat.
Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 1. sebanyak 68 (enam puluh delapan) atau 59.13 % Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemprov Kalbar melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Nilai rata-rata SKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah 83,22 atau kategori Baik. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya (Tahun 2017) yaitu 82,49,49 atau meningkat 0,73 poin. Nilai SKM tertinggi untuk Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 diraih oleh UPT Museum dengan nilai 96,07 atau kategori Sangat Baik.
 2. Adapun dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan SKM Tahun 2018 kepada Gubernur Kalbar. Nilai rata-rata SKM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah 83,57 atau kategori Baik. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya (Tahun 2017) yaitu 80,08 atau meningkat 3,49 poin. Nilai SKM tertinggi untuk Kabupaten/Kota diraih oleh Kabupaten Sintang dengan nilai 90,55 dan Kota Pontianak dengan nilai 87,55.
 3. Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Provinsi Kalbar tahun 2018 adalah 83,40 dengan mutu pelayanan B (Baik). Hal ini merupakan nilai dari IKM Pemprov yaitu 83,22 dengan mutu pelayanan B (Baik) dan nilai IKM Kabupaten/Kota yaitu 83,57 dengan mutu pelayanan B (Baik).
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Se Kalbar.
Kegiatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik ini, dilakukan melalui kunjungan secara langsung kepada 7 (tujuh) Kabupaten/kota, yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Melawi. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan mulai Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2019.
5. Inovasi Pelayanan Publik.
Hasil pelaksanaan kegiatan Inovasi Pelayanan Publik adalah keikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2019 sejumlah 31 inovasi dengan rincian 12 inovasi berasal dari Pemprov dan 19 inovasi berasal Kabupaten/Kota. Salah satu inovasi tersebut yang berasal dari Kota Pontianak, yaitu inovasi Cegah Si Manis yang Berujung Kronis berhasil meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Indonesia Tahun 2019.

6. Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan

Kegiatan Koordinasi tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan ini dilaksanakan selama 3 bulan, namun pada kenyataan kegiatan ini dilaksanakan lebih dari 3 bulan menyesuaikan dengan kegiatan dari pusat atau undangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kegiatan koordinasi tingkat nasional bidang ketatalaksanaan dilaksanakan pada triwulan pertama yang direncanakan selama 3 bulan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghadiri undangan Penyerrahan hasil Evaluasi SPBE sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/118/M.KT.03/2019 tanggal 12 Maret 2019 hal Undangan Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018.
2. Menghadiri undangan Fasilitasi Pembinaan Ketatalaksanaan Pemda pada tanggal 10 sampai dengan 12 April 2019 di Yogyakarta sesuai dengan Telegram Kemendagri Nomor 080/2730/SJ tanggal 1 April 2019 hal Rapat Fasilitasi Pembinaan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.
3. Menghadiri acara Sosialisasi Penyusunan peta Proses Bisnis di Kalimantan Selatan sesuai surat undangan dari Kemenreian PAN dan Reformasi Birokrasi RI nomor B/76/S.KT.02/2019 tanggal 17 Juni 2019.

7. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas

Kegiatan Koordinasi tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan ini dilaksanakan selama 3 bulan, namun pada kenyataan kegiatan ini dilaksanakan lebih dari 3 bulan menyesuaikan dengan kegiatan dari pusat atau undangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kegiatan koordinasi tingkat nasional bidang ketatalaksanaan dilaksanakan pada triwulan pertama yang direncanakan selama 3 bulan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghadiri undangan Penyerrahan hasil Evaluasi SPBE sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/118/M.KT.03/2019 tanggal 12 Maret 2019 hal Undangan Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018.
2. Menghadiri undangan Fasilitasi Pembinaan Ketatalaksanaan Pemda pada tanggal 10 sampai dengan 12 April 2019 di Yogyakarta sesuai dengan Telegram Kemendagri Nomor 080/2730/SJ tanggal 1 April 2019 hal Rapat Fasilitasi Pembinaan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.
3. Menghadiri acara Sosialisasi Penyusunan peta Proses Bisnis di Kalimantan Selatan sesuai surat undangan dari Kemenreian PAN dan Reformasi Birokrasi RI nomor B/76/S.KT.02/2019 tanggal 17 Juni 2019.

8. Sosialisasi Tata Naskah Dinas
Indikator kinerja yang telah ditetapkan dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas ini adalah Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Tata Naskah Dinas sebanyak 45 Perangkat Daerah (36 Perangkat Daerah dan 9 Biro di lingkungan Setda Provinsi Kalbar, dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan bahwa peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah 45 Perangkat Daerah.

9. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Pemprov Kalbar
Hasil yang terealisasi dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemprov Kalbar adalah sebanyak 45 Perangkat Daerah/Biro/UPT atau 60% dengan persentase Perangkat Daerah/UPT yang menerapkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik mendapatkan penilaian dengan indeks (kepatuhan tinggi/zona hijau).

10. Asisten Penyusunan SOP pada UPT dilingkungan Pemprov.
Dari hasil pelaksanaan kegiatan asistensi penyusunan SOP, semua UPT dapat mengikuti kegiatan ini yaitu 69 (enam puluh Sembilan) UPT walaupun belum semua yang membawa SOP sesuai yang diminta karena kurangnya pemahaman terhadap penyusunan SOP karena terjadinya mutasi terhadap beberapa pegawai dilingkungan UPT, namun sebelum dilakukan asistensi telah juga disampaikan penjelasan terkait penyusunan SOP kepada peserta yang hadir sebagai dasar bagi pegawai untuk melakukan penyusunan terhadap SOP.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 – 2019 dan target RPJMD

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan target RPJMD Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
2.	Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	IKM Provinsi Kalbar	81,41	83,40	83,17	83	

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan

dalam RPJMD. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2017 mencapai 81,41 sedangkan pada Tahun 2018 Realisasinya mencapai 83,40. Sedangkan untuk Tahun 2019 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 83,17.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran ini, yaitu :

- a. Belum adanya Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian dinas lapangan di SKPD yang melayani langsung ke masyarakat.
- b. Belum semua SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
- c. Belum adanya sinkronisasi di bidang ketatalaksanaan dalam pengimplementasian Peraturan, antara Kementerian PAN & RB serta Kementerian Dalam Negeri. Masih rendahnya pemahaman aparatur dalam penyusunan SOP.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendala tersebut, antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait agar membuat segera membuat Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas dimaksud.
- b. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan SKM di daerah sehingga mengikat semua unit pelayanan dalam melaksanakan SKM.
- c. Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/kota melalui kegiatan sosialisasi dibidang ketatalaksanaan.
- d. Perlu diadakan sosialisasi atau in house training oleh masing-masing SKPD.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen	Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen	20%	20%	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	SDM Aparatur	SDM Aparatur			
Capaian Kinerja Sasaran 3					100

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran ***“Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur setda, meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan minat baca serta pemanfaatan perpustakaan setda”***, mencapai **100 %** atau dapat dikategorikan ***“Sangat Berhasil”***. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
3.	Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	844.730.600	738.609.050	87,44%	100%	12,56

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 87,44% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 12,56. Sehingga terjadi penghematan anggaran (*Cost Cutting Program*).

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya untuk mencapai sasaran 3 tersebut di atas, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

Program Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur, yang meliputi kegiatan :

- 1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Penyusunan Formasi Jabatan fungsional tahun 2019 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juli sampai dengan September 2019 dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Formasi jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

- b. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait nomenklatur jabatan fungsional yang terbaru yang telah ditetapkan oleh Kemenpan dan RB sehingga Tahun 2018 terdapat 175 nomenklatur jabatan fungsional sedangkan Tahun 2019 sebanyak 196 jabatan fungsional yang telah ditetapkan sebagaimana rekapitulasi terlampir.
 - c. Menginformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah/unit kerja mengenai jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui surat Gubernur Kalimantan Nomor: 890/1637/OR-C tanggal 10 Juni 2019 hal Usulan Formasi Jabatan Fungsional tahun 2019 meminta agar Kepala Perangkat Daerah/unit kerja menyampaikan usulan pengisian jabatan fungsional.
2. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar Periode 2019 – 2024.
Kegiatan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Tahapan Persiapan
Pembentukan Tim Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan
 - b. Tahapan Perumusan Kebijakan
Melakukan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Barat dalam merumuskan Draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Rapat dilaksanakan sampai Bulan November selama 2 (dua) kali dengan menghasilkan rencana *Quick win* di area pelayanan publik yaitu:
 - Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui program Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK.
 - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
3. Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.
Peran Tim Pelaksana Asistensi dan verifikasi Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Bara dimulai dari Verifikasi Jabatan hingga penetapan hasil draft Analisis Jabatan yang disusun oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar sempurna.
Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim dibahas dalam rapat tim untuk permasalahan dan solusi yang diberikan dalam penyusunan analisis jabatan pada perangkat daerah maupun unit pelaksana teknis yang dilaksanakan pada :

- Hari Senin, Tanggal 21 Januari 2019, membahas hasil verifikasi penyusunan dokumen Analisis Jabatan pada Sekretariat DPRD Prov. Kalbar, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Prov. Kalbar, UPT Balai Benih Induk Hortikultura Prov. Kalbar dan UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Prov. Kalbar.
- Hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019, melaksanakan percepatan penyusunan dokumen Analisis Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar, DPMPTSP Prov. Kalbar, Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Prov. Kalbar dan UPT Pembenihan Tanaman Pangan Prov. Kalbar.
- Hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2019, membahas hasil verifikasi penyusunan dokumen Analisis Jabatan pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Prov. Kalbar, Sekretariat DPRD Prov. Kalbar, Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar.
- Hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2019, melaksanakan percepatan penyusunan dokumen Analisis Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar dan Unit Pengelolaan Kawasan Ekosistem lahan Basah Prov. Kalbar.
- Hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019, membahas hasil verifikasi analisis jabatan pada Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Kalbar dan UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Prov. Kalbar.
- Hari Senin, Tanggal 15 April 2019, membahas hasil verifikasi analisis jabatan pada DPMPTSP Prov. Kalbar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar dan UPT Pembenihan Tanaman Pangan Prov. Kalbar.
- Hari Senin, Tanggal 14 Oktober 2019, melaksanakan percepatan penyusunan dokumen Analisis Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar, UPT Pembenihan Tanaman Pangan Prov. Kalbar, UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Prov. Kalbar.
- Hari Kamis, Tanggal 17 Oktober 2019, melaksanakan percepatan penyusunan dokumen Analisis Jabatan pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Selatan, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Utara, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur, UPT Pelayanan Kesehatan Paru Prov. Kalbar.
- Hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019, melaksanakan percepatan penyusunan dokumen Analisis Jabatan pada Sekretariat DPRD Prov. Kalbar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar.
- Hari Jum'at, Tanggal 1 November 2019, melaksanakan percepatan penyusunan dokumen Analisis Jabatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kalbar, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar, Biro Administrasi

Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Prov. Kalbar, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Kalbar, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Prov. Kalbar, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalbar dan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Prov. Kalbar.

- Hari Senin, Tanggal 4 November 2019 melaksanakan percepatan penyusunan dokumen Analisis Jabatan pada Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar dan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Prov. Kalbar.
- Hari Selasa, Tanggal 5 November 2019, melaksanakan percepatan penyusunan dokumen Analisis Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar dan Dinas Sosial Prov. Kalbar.
- Hari Kamis, Tanggal 7 November 2019, melaksanakan percepatan penyusunan dokumen Analisis Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar, RSUD Dr. Soedarso Prov. Kalbar dan Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda.

Sasaran kegiatan adalah seluruh PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalbar yang mencakup 9 (sembilan) Biro. Kegiatan yang dilakukan berupa Senam Kesegaran jasmani (SKJ) yang diikuti seluruh PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar yang dilaksanakan setiap hari Jum'at mulai pukul 07.00 s.d 08.00 wiba bertempat di Halaman Komplek kantor Gubernur Kalbar.

Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan Pembinaan Jasmani PNS di lingkungan Setda Provinsi Kalbar pada program pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur :

1. Memberikan motivasi, kreativitas kepada PNS di lingkungan Setda Provinsi Kalbar dalam berolahraga khususnya senama kesegaran jasmani dan olahraga lainnya
2. Menjaga kebugaran dan kesehatan dengan berolahraga
3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

5. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kalbar.

Sasaran kegiatan adalah seluruh PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalbar yang mencakup 9 (sembilan) Biro.

Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PNS di lingkungan Setda Provinsi Kalbar selama tahun 2018 adalah :

1. Kenaikan Gaji berkala berjumlah : 183 orang
2. Kenaikan Pangkat berjumlah 72 orang antara lain :
 - Periode April 2019 berjumlah 58 orang

- Periode Oktober 2019 berjumlah 14 orang
 - 3. Cuti PNS berjumlah 246 orang terdiri dari :
 - Cuti alasan penting 16 orang
 - Cuti tahunan 195 orang
 - Cuti sakit 28 orang
 - Cuti bersalin 7 orang
 - 4. Ijin Belajar PNS
 - S1 : 2 orang
 - S2 : 1 orang
 - 5. Tugas Belajar : 2 orang
 - S1 : 1 orang
 - S2 : 1 orang
 - 6. Mutasi masuk berjumlah : 28 orang
 - 7. Mutasi keluar instansi berjumlah : 2 orang
 - 8. Usulan pensiun berjumlah : 13 orang
 - Batas usia Pensiun : 13 orang
 - 9. Rekap Mahasiswa/siswa magang : 105 orang
6. Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar.
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
- a. Menghimpun dan menata buku bahan koleksi Perpustakaan.
 - b. Melakukan penyimpanan pelestarian bahan pustaka terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dari jaman penjajahan Belanda tahun 1916, Surat Kabar Akcaya dari tahun 1977-1999, Surat Kabar Pontianak Post dari tahun 2000-2019.
 - c. Mengolah data Buku Perpustakaan sesuai dengan Klarifikasinya berjumlah 732.090 buku.
 - d. Menjilid bahan pustaka yang rusak sebanyak 118 buku Deposit dan 25 Buku Referensi.
 - e. Menjilid Majalah /Koran :
 - Trubus bulan Januari sampai dengan Desember 2019 = 2 buku
 - Tempo bulan Januari sampai dengan Desember 2019 = 5 buku
 - Gatra bulan Januari sampai dengan Desember 2019 = 5 buku
 - Koran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 = 6 buku
 - f. Melayani pengunjung Perpustakaan dari bulan Januari sampai dengan Desember sebanyak 350 orang terdiri dari : Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar; Pegawai dari Luar Instansi; Mahasiswa; Pelajar; Masyarakat.
7. Verifikasi Penyusunan Analisis Beban Kerja dilingkungan Setda Prov. Kalbar
Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Namun demikian honorarium untuk tim hanya disediakan 9 (sembilan) bulan dari

Bulan April sampai dengan Bulan Desember dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Tahapan Persiapan

Pembentukan Panitia Pelaksana Verifikasi Penyusunan Fasilitas dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dalam kegiatan ini dengan mengirimkan surat kepada seluruh Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyusun dokumen ABK berpedoman dengan peraturan yang berlaku

c. Tahapan Verifikasi Data

Biro yang telah diverifikasi oleh Biro Organisasi yaitu:

- 1) Biro Organisasi
- 2) Biro Pengelolaan Aset
- 3) Biro Pemerintahan
- 4) Biro Kesra
- 5) Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa

Biro yang belum menyampaikan draft ABK yaitu:

- 1) Biro Umum
- 2) Biro Perkenomian
- 3) Biro Humas
- 4) Biro Hukum.

Selain verifikasi ABK di lingkungan Setda. Prov. Kalbar, dilaksanakan juga verifikasi beberapa Perangkat Daerah lainnya yaitu:

- 1) Dinas Kehutanan
- 2) UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner & Klinik Hewan
- 3) UPT Pembenihan Tanaman Pangan
- 4) UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat
- 5) UPT Pelayanan Kesehatan Paru

8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota

Dalam rangka memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kab/Kota berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Kab/Kota sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kab/kota yang telah ditetapkan. Selain itu kegiatan monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat diketahui tingkat pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, untuk selanjutnya dijadikan masukan dalam

perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi berikutnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi instansi Pemerintah. Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada intinya berisi pembinaan dan pemantauan terhadap progres penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi pada Kabupaten/Kota. Adapun Kabupaten/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 yaitu:

1. Kota Singkawang
2. Kabupaten Sambas
3. Kabupaten Landak
4. Kabupaten Kapuas Hulu

Namun demikian, sehubungan dikarenakan adanya pemangkasan anggaran pada kegiatan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi maka Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan monitoring dan evaluasi tahun 2019 hanya 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu **Kabupaten Landak dan Kabupaten Kapuas Hulu**.

Hal lain yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah progres agenda reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka memantau progres ini telah tersedia suatu instrumen penilaian yang dikenal sebagai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penggunaan instrumen ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi instansi Pemerintah.

9. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.

Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- a) Pembentukan Panitia Pelaksana Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Nomor 72/OR/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- b) Pengumpulan bahan pendukung seperti peraturan, pedoman, juklak juknis terkait Jabatan Pimpinan Tinggi yang akan disusun standar kompetensinya.

2. Tahap Pelaksanaan

a) Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, sebagai berikut :

-Pengumpulan data, yang meliputi :

- 1) Struktur organisasi dan tata kerja yang memuat nama jabatan, tugas pokok, dan fungsi yang diperlukan untuk merumuskan standar kompetensi jabatan agar tugas yang dilaksanakan sesuai tupoksi;
- 2) Ikhtisar Jabatan dan Uraian Tugas diperlukan sebagai informasi yang lebih spesifik untuk menentukan jenis dan level kompetensi dari setiap jabatan dalam unit organisasi;
- 3) Visi dan Misi Organisasi diperlukan sebagai landasan untuk mengkonfirmasi jenis kompetensi yang diperlukan;
- 4) Dokumen perencanaan nasional atau daerah, baik Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah sebagai pertimbangan dalam mengidentifikasi jenis kompetensi yang perlukan;
- 5) Dokumen perencanaan Instansi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi jenis kompetensi yang diperlukan;
- 6) Dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan guna mengidentifikasi jenis kompetensi yang diperlukan; dan
- 7) Analisis data dan informasi tersebut di atas dipergunakan untuk memastikan jabatan yang ada dalam organisasi sudah sesuai dengan mandat dan tugas fungsi organisasi serta relevan dengan visi, misi organisasi.

- Identifikasi Kompetensi untuk menentukan kompetensi dan levelnya berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) menentukan nama jabatan yang akan diidentifikasi;
- 2) menuangkan ikhtisar jabatan;
- 3) menganalisis setiap uraian tugas yang memerlukan kompetensi teknis;
- 4) Menganalisis jenis kompetensi teknis yang diperlukan untuk masing - masing jabatan pimpinan tinggi;
- 5) Mengidentifikasi dan menetapkan level kompetensi teknis yang diperlukan oleh suatu jabatan, sesuai dengan uraian tugas dan hasil kerja, output atau outcome dari jabatan; dan

- 6) Menyusun konsep standar kompetensi jabatan dengan mengacu pada :
- standar kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 38 Tahun 2017;
 - Kamus Kompetensi Teknis yang telah disusun/ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang urusan pemerintah yang relevan; dan
 - apabila Kamus Kompetensi Teknis belum ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang urusan pemerintah tertentu, maka instansi dapat menyusun kompetensi teknis sendiri.
- Menyusun persyaratan jabatan, yang meliputi :
- 1) Persyaratan jabatan yang dicantumkan dalam standar kompetensi jabatan antara lain pangkat, kualifikasi pendidikan, jenis pelatihan, ukuran kinerja jabatan dan pengalaman kerja;
 - 2) Kualifikasi pendidikan dirumuskan dalam jenjang pendidikan terendah yang layak untuk menduduki jabatan atau kemampuan melakukan tugas jabatan dalam kondisi normal (yang menggambarkan kemampuan pada umumnya). Perumusan jenjang kualifikasi pendidikan dilakukan dengan menganalisis relevansi atau keterkaitan langsung dengan kemampuan melaksanakan tugas dan atau untuk memiliki kompetensi dari suatu jabatan yang telah dirumuskan dan ditetapkan;
 - 3) Jenis Pelatihan adalah jenis pelatihan minimal yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi, dan menentukan kelayakan untuk menduduki jabatan. Pelatihan dapat berupa pelatihan manajerial, pelatihan teknis dan pelatihan fungsional. jenis dan bentuk pelatihan yang dirumuskan hanya pelatihan yang memiliki relevansi dengan tugas jabatan dan/atau kompetensi yang telah dirumuskan/ditetapkan;
 - 4) Pengalaman kerja dirumuskan dari pengalaman menduduki jabatan di bidang tugas atau urusan pemerintah yang memiliki relevansi langsung dan berkaitan erat dengan jabatan baik dari aspek relevansi dan keterkaitan dengan tugas jabatan, dan/ atau yang relevan dan memiliki keterkaitan dan kesamaan kompetensi jabatan yang dirumuskan;
 - 5) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian

- sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Perumusan pangkat dalam persyaratan jabatan sesuai disesuaikan dengan uraian tugas, tingkat kesulitan, dampak dan tanggung jawab; dan
- 6) Ukuran kinerja jabatan disesuaikan dengan tingkat pentingnya (urgensi) ukuran tersebut terhadap tugas atau peran jabatan tersebut dalam organisasi. Ukuran kinerja jabatan dirumuskan dalam bentuk: a. kuantitas dari produk/hasil kerja; b. kualitas dari produk/hasil kerja; c. waktu penyelesaian produk/hasil kerja; dan/atau d. biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output/hasil kerja atau outcome. Berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian PAN dan RB, ukuran kinerja yang digunakan adalah kualitas.
- Validasi Standar kompetensi yang telah disusun oleh tim perlu dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yaitu atasan pemegang jabatan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang standarisasi jabatan setingkat pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama atau pegawai yang dianggap mampu memberikan masukan yang diperlukan, sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keabsahan standar kompetensi. Konfirmasi bertujuan untuk memastikan bahwa kompetensi yang telah dirumuskan dalam standar kompetensi telah sesuai dengan uraian jabatan atau uraian pekerjaan dari jabatan yang akan ditetapkan kompetensinya.

Validasi dilakukan dengan mengundang Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat terkait di Perangkat Daerah yang sedang disusun SKJ JPT nya untuk dimintai konfirmasi kesesuaian antara kompetensi yang disusun dengan uraian jabatan atau uraian pekerjaan. Adapun rapat validasi yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, memvalidasi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, Direktur dan Wadir II RSUD dr. Soedarso Prov. Kalbar, Direktur Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar, Kepala Satpol PP Prov. Kalbar, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Kalbar;
- 2) Hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019, memvalidasi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.

- Kalbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar, Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar;
- 3) Hari Selasa, tanggal 9 April 2019, memvalidasi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 4) Hari Rabu, 10 April 2019, memvalidasi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Kepala Biro Humas dan Protokol, Wakil Direktur I RSUD dr. Soedarso, dan Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan;
 - 5) Hari Rabu, 10 Juli 2019, memvalidasi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - 6) Hari Kamis, 11 Juli 2019, memvalidasi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.
 - 7) Selain rapat validasi, tim juga melakukan validasi ke Pemangku Jabatan secara langsung, antara lain :
 - Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
 - Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi dan Umum
 - Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi
 - Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia.
- Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Mei 2019, dengan tujuan untuk mengkoordinasikan penyusunan standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta konsultasi secara umum terkait

penyusunan standar kompetensi jabatan ke KemenpanRB dan Kemendagri. (lampirkan bukti laporan dan sppd)

- Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
 - 1) Standar kompetensi Jabatan yang telah disusun disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui website menpan atau e-kompetensi. Dalam hal ini, SKJ yang telah disusun disampaikan melalui surat resmi dari Gubernur melalui email/fax/Pos
 - 2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan pembahasan standar kompetensi (konsensi) dengan mengundang instansi pengusul, instansi penyelenggara urusan pemerintah yang relevan, para ahli terkait dan instansi pengguna yang relevan dengan jabatan;
 - 3) Sesuai ketentuan dalam Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017, seharusnya SKJ yang telah disusun dan ditetapkan oleh menpan berlaku secara nasional, namun karena Kementerian/Lembaga banyak yang belum menyusun Kamus Kompetensi Teknis, maka sampai saat ini, SKJ yang diusulkan ke Menpan ditetapkan dan berlaku untuk di lingkungan instansi pengusul saja.
 - 4) Setelah memperoleh koreksi dari KemenpanRB maka SKJ yang telah disusun diperbaiki kembali dan disampaikan ulang untuk selanjutnya ditetapkan oleh MenpanRB
 - 5) Surat penetapan dari MenpanRB digunakan sebagai dasar penetapan SKJ JPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 - 6) Adapun Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi baik Madya maupun Pratama yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 27 dokumen.

10. Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disusun oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit.
- b. Standar Kompetensi Jabatan merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan, merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

- c. Standar Kompetensi Jabatan harus disusun dengan baik dan benar sesuai pedoman yang mengacu pada Permepan RB No. 38 Tahun 2017 dengan memperhatikan Struktur organisasi dan tata kerja yang memuat nama jabatan, tugas pokok, dan fungsi yang diperlukan untuk merumuskan standar kompetensi jabatan agar tugas yang dilaksanakan sesuai tupoksi.
- d. Standar Kompetensi Jabatan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan aparatur sipil negara, pengadaan aparatur sipil negara, pengembangan karier aparatur sipil negara, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, penempatan aparatur sipil negara, promosi dan/atau mutasi aparatur sipil negara, uji kompetensi aparatur sipil negara, sistem informasi manajemen aparatur sipil negara; dankelompok rencana suksesi (*talent pool*) aparatur sipil negara.

11. Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2019.

Penyusunan Formasi PNS Tahun 2019 dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Namun demikian honorarium untuk tim hanya disediakan 6 (enam) bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Formasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 2) Menyusun data profil Daerah Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 3) Menyusun rekapitulasi data Kelembagaan dan Data Bezetting Kepegawaian
- 4) Menyusun Data Guru dan Data Kesehatan.
- 5) Menyiapkan Surat Gubernur Kalimantan Barat tentang usulan Formasi PNS Tahun 2019.

Rekapitulasi terhadap Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan penyusunan Formasi PNS berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 890/0149/OR-C tanggal 8 Januari 2019 hal Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 adalah **Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Bengkayang.**

Selain melakukan penyusunan formasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pematkhiran data pada aplikasi e-formasi. Walaupun, tidak didukung oleh anggaran tetap dilaksanakan pematkhiran data pada aplikasi e-formasi namun tidak optimal sehingga untuk data terkait jumlah sekolah SMA dan SMK serta kebutuhan guru belum terkini/*up to date*.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2017 - 2019 dan target RPJMD

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan target RPJMD Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2019	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
3.	Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur	75%	20%	20%	20%	n/a

Pada Tahun 2019 Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur ditargetkan sebanyak 20% dan terealisasi sebanyak 20% dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Sementara pada tahun 2018 Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur terealisasi sebanyak 20% dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Untuk tahun 2017 Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur sebanyak 20% atau 100 % dari jumlah Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas pengukuran masih belum berorientasi sepenuhnya kepada pencapaian kinerja program, namun pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- 2) Evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, belum kepada hasil program sehingga masih belum sepenuhnya mampu menampilkan efektivitas program yang diemban oleh setiap Perangkat Daerah.
- 3) Belum semua Kabupaten/Kota di Kalbar mengikuti kompetisi Inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB hal ini disebabkan karena Kurangnya Sosialisasi dari Kementerian PANRB terhadap Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan hingga ke daerah. Selama ini sosialisasi diadakan di Jakarta atau di luar daerah Kalbar

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun dengan melakukan integrasi aplikasi manajemen kinerja dengan perencanaan dan penganggaran agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi;
- 2) Meningkatkan pemahaman dan ketertiban pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi;
- 3) Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dan organisasi sebagai ukuran pemberian *Reward and Punishment*
- 4) Keikutsertaan pemerintahan daerah dalam mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan hal positif dalam mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hendaknya Mengusulkan KemenPAN RB agar lebih intensif melakukan sosialisasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

**Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Sasaran Strategis 4**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	10,5	10,52	100,1
Capaian Kinerja Sasaran 4					100,1%

Realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2019 ditargetkan sebanyak 10,5 dan terealisasi sebanyak 10,52 dengan capaian kinerja sebesar 100,1 %.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
4.	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.	Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 385.458.600	Rp. 360.513.750	93,53	100,1	6,57

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93,53 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,1%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 6,57. Sehingga terjadi penghematan anggaran (*Cost Cutting Program*).

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya untuk mencapai sasaran 4 tersebut di atas, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Kinerja Pemprov Kalbar.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara terus-menerus telah berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja terutama terkait dengan penyempurnaan dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja sesuai rekomendasi yang disampaikan Kementerian PAN dan RB atas evaluasi laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 yang lalu.

Selanjutnya, pada tahun 2018 Kementerian PAN dan RB telah memiliki sistem aplikasi e-sakip reuiu (<https://esr.menpan.go.id/>) untuk seluruh Provinsi yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah sehingga dokumen-dokumen terkait SAKIP dapat langsung di upload pada aplikasi tersebut untuk memudahkan Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB dalam melakukan Evaluasi.

Laporan Kinerja yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov Kalbar.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, sehingga telah ditetapkan dan dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 berdasarkan Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan.
- Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 diserahkan ke Kementerian PAN dan RB pada satu bulan setelah DPA di tetapkan.
- Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 telah diupload pada aplikasi e sakip Kementerian PAN & RB pada tanggal 29 Maret 2019.
- Terdapat kendala saat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu terdapat beberapa anggaran UPT yang masih belum ditetapkan di dalam ADBP Prov. Kalbar sehingga menghambat penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat karena di dalam dokumen Perjanjian Kinerja tersebut juga menyajikan anggaran seluruh UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD Pemprov Kalbar.

1. Pelaksanaan Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemprov Kalbar dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2019. Peserta asistensi meliputi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 disampaikan paling lambat tanggal 4 Februari 2019 kepada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar.
3. Substansi Reviu atas hasil asistensi Laporan Kinerja dan Perjankin Perangkat Daerah terdiri dari:
 - Format (Daftar Isi) dan kelengkapan Laporan Kinerja dan Perjankin Perangkat Daerah;
 - Kualitas Pelaporan dan Substansi Laporan Kinerja;
 - Penyajian Data Kinerja;
 - Termasuk Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja
4. Pelaksanaan Reviu atas hasil asistensi Laporan Kinerja dan Perjankin Perangkat Daerah Tahun 2019 :
 - Reviu dilakukan terhadap Laporan Kinerja dan Perjankin Perangkat Daerah.

- Reviu dilakukan dengan menggunakan teknik “criteria referenced survey” yaitu survey berdasarkan kriteria dengan menggunakan yes/no question terhadap kriteria.
 - Kriteria tersebut merupakan ketentuan-ketentuan dan *best practice* yang harus disajikan dalam Laporan Kinerja
5. Output dari kegiatan ini yaitu berupa Laporan Hasil Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja sebanyak 2 dokumen.
 6. Indikator hasil dari kegiatan asistensi ini yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja dengan baik dengan target 26 Perangkat Daerah dan capaian indikator tersebut yaitu sebanyak 23 Perangkat Daerah atau sebesar 88% dan Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja dengan baik dengan target 26 Perangkat Daerah dan capaian indikator tersebut sebesar 26 Perangkat Daerah atau 100%.
4. Pembinaan Penerapan SAKIP di daerah.
 1. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penerapan SAKIP yang dilaksanakan 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi.
 2. Pemkab/Kota se-Kalbar telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Kementerian PAN & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di daerah-nya.
 5. Workshop SAKIP.
 - a. Pelaksanaan kegiatan **Workshop SAKIP** dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 2 November 2019 bertempat di Kementerian PAN dan RB. Workshop SAKIP dilaksanakan bagi 45 Perangkat Daerah.
 - b. Peserta Kegiatan Workshop Penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah ini terdiri dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro Setda Prov. Kalbar, Sekretaris Dinas/Badan dan Kepala Sub Bagian Renja/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Narasumber dari Kementerian PAN dan RB terdiri dari :
 - Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah II pada Kementerian PAN dan RB;
 - Asdep Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah II, Ibu Dra. Nadimah, M.BA;
 - Ibu Dra. Endang Purwaningsih, MAP selaku Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - Novan Kharisma Salainti, S.IAN selaku Analis pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi RB Kunwas Wilayah II.

- d. Adapun peserta yang hadir sebanyak 120 orang.
- e. Kegiatan Workshop SAKIP dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu kelas pembahasan RPJMD (pesertanya BAPPEDA Provinsi), dan dua kelas diisi oleh Perangkat Daerah Pemprov. Kalbar dan ruang yang digunakan yaitu ruang sriwijaya, ruang bone dan ruang serbaguna. Materi yang dipaparkan oleh Perangkat Daerah mengenai Cascading (penjabaran masing-masing kinerja) Perangkat Daerah.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 - 2019 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2019 dan target 2019 Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2019	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019		
4.	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	9,5	10	10,52	10,5	

Pada Tahun 2018 Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja ditargetkan sebanyak 9,5 dan terealisasi sebanyak 9,5 dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Sementara pada tahun 2019 Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja terealisasi sebanyak 10 dengan capaian kinerja sebesar 100 %. pada tahun 2017 Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja terealisasi sebanyak 10,52 dengan capaian kinerja sebesar 100,1 %.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Terlepas dari hasil capaian kinerja tersebut, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian Sasaran ini, yaitu :

- a. Masih terdapat penyajian analisis program/kegiatan dalam pencapaian keberhasilan atau kegagalan yang belum dijabarkan secara komprehensif.
- b. Kepatuhan memenuhi batas waktu penyampaian Laporan Kinerja, yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Kalbar.

- c. Data yang diperlukan dalam penyusunan LKj Pemerintah Provinsi terkadang menunggu hasil rilis/ hasil penilaian dari lembaga teknis lain/kementerian.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut antara lain :

- a. Memberikan pemahaman kepada seluruh SKPD untuk membuat analisis pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja.
- b. Memberikan peringatan kepada SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) melampaui batas waktu yang ditentukan.
- c. Menyusun revisi laporan kinerja instansi Pemerintah Provinsi terhadap dana-dana yang sudah rilis diatas bulan maret tahun berjalan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat telah dialokasi anggaran dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 3.092.546.200,00. Anggaran ini merupakan angka setelah adanya perubahan anggaran. yang terdiri atas anggaran program rutin/penunjang sebesar Rp. 835.863.500,00 dan anggaran program prioritas sebesar Rp. 2.256.682.700,00 sebagaimana yang terdapat dalam tabel yaitu :

**TABEL 3.5
ALOKASI DAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN POKOK/PRIORITAS**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	449.090.300	411.850.500	91,71
	1) Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	57.125.450	54.001.100	94,53
	2) Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi Se Kalbar	74.778.700	71.226.300	95,25
	3) Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	25.632.300	25.159.800	98,16
	4) Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kab/Kota	37.680.000	37.410.000	99,34
	5) Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	140.326.450	138.119.700	98,43

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	6) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	28.023.200	27.224.900	97,15
	7) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas	61.645.700	39.695.700	64,39
	8) Koordinasi Tingkat Nasional dibidang Kelembagaan Perangkat Daerah	23.898.500	19.013.000	79,56
B.	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSA-NAAN PEMERINTAH DAERAH	577.403.200	530.311.200	91,84
	1) Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	44.392.500	41.744.000	94,03
	2) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	64.598.000	62.982.500	97,50
	3) Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	47.338.000,	46.698.000	98,65
	4) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Se Kalbar	55.107.000,	54.291.000,	98,52
	5) Inovasi Pelayanan Publik	65.442.300	49.253.700	75,26
	6) Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan	39.613.200	38.336.400	96,78
	7) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas	26.906.500,	24.486.500,	91,01
	8) Sosialisasi Tata Naskah Dinas	46.857.000	44.505.400	94,98
	9) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemprov. Kalbar	122.148.700	103.973.700	85,12
	10) Asisten Penyusunan SOP pada UPT dilingkungan Pemprov.	65.000.000	64.040.000	98,52
C.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEM-BANGAN SUMBER DAYA APARATUR	844.730.600	738.609.050	87,44
	1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	48.936.600	39.786.200	81,30
	2) Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar Periode 2019-2024	68.899.000	61.489.000,	89,25
	3) Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar	105.677.850	96.427.850,	91,25
	4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda Prov.	108.930.000,	97.455.000,	89,47

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	5) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kalbar	95.608.700	83.143.900,	86,96
	6) Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	38.449.700	30.988.600,	80,60
	7) Verifikasi Penyusunan ABK dilingkungan Setda Prov. Kalbar	75.597.500	68.992.900,	91,26
	8) Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	57.645.050	47.060.700,	81,64
	9) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	100.975.800	82.633.000,	81,83
	10) Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Adminitrasi dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	96.791.100	86.077.600,	88,93
	11) Penyusunan formasi PNS dilingkungan Pemprov Kalbar Tahun 2019	47.219.300	44.554.300,	94,36
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWA-SAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENG-GARAAN PEMERINTAHAN	385.458.600	360.513.750	93,53
	1) Penyusunan Laporan Kinerja Pemprov Kalbar Tahun 2017	78.399.000,	74.239.000	94,69
	2) Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov Kalbar Tahun 2018	23.050.000	22.730.000,	98,61
	3) Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD Pemprov Kalbar Tahun 2017	36.400.000	34.680.000,	95,27
	4) Pembinaan Penerapan SAKIP di daerah	78.118.000	73.428.300,	94,00
	5) Workshop Penyusunan Cascading Kinerja OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	169.491.600	155.436.450	91,71
	JUMLAH	2.256.682.700	2.041.284.500	90,45

BAB IV PENUTUP

Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2019, khususnya untuk 4 (empat) Sasaran, 4 (empat) Program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian kinerja telah mencapai **90,45%** atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Tingkat pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Tertatanya kelembagaan pe-rangkat daerah Provinsi / Kabupaten / kota yang efisien, efektif, dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi, sebesar 158%, yang mencakup program antara lain ;
 - *Program Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah (91,71%)*
2. Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalak-sanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas sebesar 100,2%, yang mencakup program antara lain :
 - *Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah (91,84%)*.
3. Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur setda, serta pemanfaatan perpustakaan setda, sebesar 100%, yang mencakup program antara lain :
 - *Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (87,44%)*.
4. Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance, sebesar 100,1%, yang mencakup program antara lain :
 - *Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan (93,53%)*.

Secara umum, capaian kinerja yang dicapai tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- Capaian kinerja untuk 4 (empat) sasaran yang dilakukan pengukuran dapat dikategorikan Sangat Berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 90,45%.
- Capaian kinerja untuk 4 (empat) program pokok yang dilakukan pengukuran dapat dikategorikan Berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 90,45%.
- Capaian kinerja untuk 35 (tiga puluh lima) kegiatan pokok yang dilakukan pengukuran dapat dikategorikan Sangat Berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 90,45%.

Walaupun pencapaian kinerja dikatakan berhasil, namun masih ada beberapa hambatan didalam pencapaian sasaran, program dan kegiatan di atas, antara lain :

- a. Masih adanya revisi berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang organisasi.
- b. Belum adanya Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian dinas lapangan di Perangkat Daerah yang melayani langsung ke masyarakat.
- c. Belum semua Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
- d. Belum adanya sinkronisasi di bidang ketatalaksanaan dalam pengimplementasian Peraturan, antara Kementerian PAN & RB serta Kementerian Dalam Negeri.
- e. Masih rendahnya pemahaman aparatur dalam penyusunan SOP.
- f. Masih terdapat penyajian analisis program/kegiatan dalam pencapaian keberhasilan atau kegagalan yang belum dijabarkan secara komprehensif.
- g. Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian Laporan Kinerja sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Kalbar.

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendala tersebut, antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar membuat segera membuat Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas dimaksud.
- c. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan SKM di daerah sehingga mengikat semua unit pelayanan dalam melaksanakan SKM.
- d. Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/kota melalui kegiatan sosialisasi dibidang ketatalaksanaan.
- e. Perlu diadakan sosialisasi atau in house training oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- f. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah untuk membuat analisis pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja.
- g. Memberikan peringatan kepada Perangkat Daerah yang menyampaian Laporan Kinerja (LKj) melampaui batas waktu yang ditentukan.

Pontianak, 31 Maret 2020
KEPALA BIRO ORGANISASI



MARJANI, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660302 198703 1 012